



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai - Makassar  
Telepon (0411) 590591 - 590592, Faksimile (0411) 590595  
Email : [sulsel@bpkp.go.id](mailto:sulsel@bpkp.go.id)

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021**

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-681/PW21/6/2021 tanggal 5 bulan Mei tahun 2021, kami telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana aksi kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Makassar, 12 Mei 2021

Kepala Perwakilan,



Arman Sahri Harahap  
NIP 19670110 199303 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021**  
**PERWAKILAN PPPK PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
				TARGET 2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1		3		5	-	-	1	4
2				6	-	-	-	4
1	Memungkainya Pengembangan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	5	-	-	1	4
2		Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	6	-	-	-	4
		Jumlah Program Prioritas Strategis yang tercapai sesuai target	Program Prioritas Strategis	3	-	-	-	4

No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
						TW1	TW2	TW3	TW4
10		12	12	13		15	16	17	18
2	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP	Sedang	13.080.000	IPP	PP				1
4	Pengawasan atas Program Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Sedang	300.840.000	IPP	PP				23
5	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan dan Pemukiman)	Sedang	116.500.000	IPP	PP			5	5
6	Pengawasan atas Perwi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Perhubungan (Kereta Api, Pelembutan, Bandara)	Sedang	23.300.000	IPP	PP		1		1
7	Pengawasan atas Perwi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Perawatan Ekonomi (TORA dan Semtkasi Lahan)	Sedang	46.600.000	IPP	PP		2		2
8	Pengawasan atas Tunggalan Pembayaran Tahun Sebelumnya Dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	Tinggi	12.590.000	IPP	PP				1
9	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	Sedang	57.770.000	IPP	PP		2		2
10	Pengawasan Intern atas Program Strategis Nasional- Kegiatan Penguatan Sosial	Tinggi	25.100.000	IPP	PP			2	
11	Pengawasan Intern atas Proyek Strategis Nasional- Kegiatan Penguatan Pembangunan Rakyat	Tinggi	25.100.000	IPP	PP		2		
12	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Sedang	15.335.000	IPP	PP				1
13	Pengawasan Tata Kelola Kegiatan Tanah Obyek Reklam Agra (TORA) KLHK	Tinggi	16.610.000	IPP	PP			2	
14	Pengawasan Lintas Sektor/ Peningkatan Kualitas Multimoda dan Anlramoda mendukung Perumbuhan Ekonomi	Sedang	11.650.000	IPP	PP				1
15	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industrialisasi	Sedang	17.890.000	IPP	PP				1
16	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pencapaian Lapangan Kerja.	Sedang	21.900.000	IPP	PP				1
17	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Tinggi	13.080.000	IPP	PP				1
18	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mergulakan Peningkatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT)	Tinggi	13.080.000	IPP	PP			1	
19	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Program Prioritas Perneratan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan ptek-inovasi	Sedang	10.275.000	IPP	PP				1
20	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Bantuan Sosial dan Susudi Tepat Sasaran (Verifikasi DII Program Kelurga Harapan dan Evaluasi Program Kelurga Harapan serta Evaluasi Surling))	Sedang	10.275.000	IPP	PP		1		
21	Pengawasan Lintas Sektor/ Program Prioritas atas Peningkatan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Sedang	10.275.000	IPP	PP			1	
22	Dukungan Pengembangan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Sedang	10.275.000	IPP	PP				1
23	Pengawasan Lintas Sektor/ Program Prioritas atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Sedang	10.275.000	IPP	PP			1	
24	Dukungan Pengembangan atas Penerapan Kebijakan MBK/MBM, SAKIP, dan Inggitas ASN	Sedang	10.275.000	IPP	PP			1	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				
					TW1	TW2	TW3	TW4	
<b>BIDANG APD</b>									
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Perencanaan Negara/Daerah yang Terlelisis	Rupiah (Juta)	158	-	-	-	-	158
2		Potensi Penyerapan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	316	-	-	-	-	316
3	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7	-	-	-	-	7
4		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	7	-	-	-	-	7
5	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Inem KIL/PR/BU	Jumlah KIL/Permda dengan Mutuas SPR ≥ Level 3	Pemda	16	15	-	-	-	1
6		Jumlah Pemda kank/kecil dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	1	-	-	-	-	1
7		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1
8		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Peranggungjawaban Keuangan Desa	Persen	35%	35%	35%	35%	35%	35%
9		Jumlah ATP yang Mengimplementasikan Sswastakudes	ATP	1	-	-	-	-	1

No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
						TW1	TW2	TW3	TW4
25	Pengawasan Atas Program prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Ujray Anti Korupsi	Sedang	11.835.000	IPP	PP				1
26	Pengawasan atas Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Sedang	10.275.000	IPP	PP				1
1	Sistansi Manajemen Risiko	Sedang	12.356.000	APD	PP				1
2	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Sedang	149.214.000	APD	PP			3	10
3	Perbaikan SPR dan Sistansi Manajemen Risiko pada Kemendagri, Kemendes PDTT, BNPP, dan Pemda	Tinggi	100.448.000	APD	PP				8
4	Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa	Sedang	38.868.000	APD	PP				3
5	Pengawasan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang	12.356.000	APD	PP				1
6	Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Tinggi	16.045.000	APD	PP				1
7	Pengawasan Perencanaan Daerah	Sedang	12.356.000	APD	PP				1
8	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Rendah	38.868.000	APD	PP				3
9	Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden	Tinggi	27.234.000	APD	PP			1	1
10	Pengembangan dan implementasi Aplikasi SIMDA Next Generation (Next-G)	Sedang	100.144.000	APD	PP				8
11	Peningkatan Kualitas APBDDesa	Sedang	51.824.000	APD	PP		4		
12	Peningkatan Kualitas Bimtek Bimlu LKPD	Sedang	12.518.000	APD	PP		1		
13	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran Pemda	Sedang	25.036.000	APD	PP		1		
14	Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan	Tinggi	12.966.000	APD	PP				1
15	Pengawasan Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Tinggi	12.356.000	APD	PP				1
16	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Penataan Biaya Politik	Tinggi	12.966.000	APD	PP				1

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA			
					TW1	TW2	TW3	TW4
<b>BIODAG AKUNTANSI NEGARA</b>								
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	9	-	-	-	9
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
<b>BIODAG INVESTIGASI</b>								
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1396	349	349	349	349
2		Nilai penyelesaian keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27,124	6,781	6,781	6,781	6,781
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75%	-	-	25%	75%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimantapkan/ditindaklanjuti	Persen	100	-	25%	50%	100%

No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	RPL			
						TW1	TW2	TW3	TW4
1	Pengawasan atas Akuntabilitas, Tata Kelola, Kapabilitas SP1 dan SIA BLUD pada BLU dan BLUD	Sedang	11,510,000 AN	PP					1
2	Pengawasan atas Capaian Penugasan Presiden Program 35,000 MW	Sedang	12,240,000 AN	PP					1
3	Pengawasan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada BLU dan BLUD	Sedang	16,700,000 AN	PP					1
4	Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	Sedang	41,050,000 AN	PP			2		1
5	Pengawasan terhadap penanganan dan penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan pada intervensi Pembayaran kaim rumah sakit yang menangani COVID-19	Tinggi	235,000,000 AN	PP				5	
6	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan pada intervensi Penyulutan Insentif Tenaga Medis Pusat dan Daerah serta Penyulutan	Tinggi	312,550,000 AN	PP				10	
7	Pengawasan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi - Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Korporasi Bidang Usaha Agribisnis, Infrastruktur dan Perdagangan	Sedang	34,300,000 AN	PP					1
8	Pengawasan atas Peran BUMD Jasa Air dalam Mendukung Perluasan Infrastruktur Dasar - Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	Sedang	334,090,000 AN	PP					22
9	Pengawasan atas Peran BUM Desa dalam Mendukung Peningkatan Kemiskinan dan Penguatan Kelembagaan dan UMKM	Sedang	11,510,000 AN	PP					1
10	Pengawasan Peran Badan Usaha Agribisnis dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan - Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Perikanan, Tata Kelola Sistem Pangan Nasional dan Peningkatan Produktivitas dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	Sedang	21,670,000 AN	PP					1
11	Pengawasan atas tata kelola PSN Pembangunan Infrastruktur Kelembagaan dengan Penguatan Penguatan EBT	Sedang	24,480,000 AN	PP			1		1
12	Pengawasan terhadap Peran Badan Usaha dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan - Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pangan	Sedang	12,240,000 AN	PP				1	
13	Pengawasan terhadap Peran Badan Usaha dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan - Kegiatan Peningkatan	Sedang	3,300,000 AN	PP					1
1	Pengawasan Keinvestigasi terkait program prioritas peningkatan konektivitas multi moda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	Rendah	16,840,000 INVESTIGASI	PP					1
2	Pengawasan Keinvestigasi terkait program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Rendah	16,840,000 INVESTIGASI	PP					1
3	Pengawasan Keinvestigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Instansi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah (Audit Penyusunan Harga/Klaim)	Sedang	16,840,000 INVESTIGASI	PP					1
4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi (FCP)	Rendah	5,860,000 INVESTIGASI	PP					1

